



Dua Sisi Koin Pengentasan Kemiskinan: Peran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barlingmascakeb

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Kelvin Tandra Wicaksana Universitas Jenderal Soedirman kelvin.wicaksana@mhs.unsoed.ac.id +6285869735668</p> <p>Kikin Windhani Universitas Jenderal Soedirman kikin.windhani@unsoed.ac.id +6281325613374</p> <p>Adristi Rahma Kirana Universitas Jenderal Soedirman rahma.kirana@mhs.unsoed.ac.id +6281325356803</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wicaksana, K. T., Windhani, K., & Kirana, A. R. (2025). Dua Sisi Koin Pengentasan Kemiskinan: Peran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barlingmascakeb. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2228-2239.

Abstrak

Kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan akses terhadap layanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) selama periode 2015–2024. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terbaik yang ditentukan melalui uji Chow dan uji Hausman, yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal belum efektif dalam menurunkan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh efektifitas alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran atau tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, meskipun manfaatnya belum sepenuhnya merata. Implikasi dari hasil ini menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besaran anggaran dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada efektivitas penggunaan belanja publik dan pemerataan hasil pembangunan. Diperlukan strategi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat miskin agar upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Belanja Modal, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Poverty remains a multidimensional development challenge, encompassing economic deprivation, social exclusion, and limited access to basic services. This study aims to analyze the effect of capital expenditure and economic growth—proxied by Gross Regional Domestic Product (GRDP)—on the poverty rate in the Barlingmascakeb region, which includes Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, and Kebumen, over the 2015–2024 period. A panel data regression method was employed, with the best model determined through Chow and Hausman tests, resulting in the use of the Fixed Effect Model (FEM). The results show that capital expenditure has a positive and significant effect on poverty. This indicates that increases in capital expenditure have not effectively contributed to poverty reduction. The inefficiency may stem from poorly targeted budget allocations or capital spending that does not directly address the needs of low-income populations. On the other hand, GRDP has a negative and significant effect on poverty, suggesting that economic growth plays a role in reducing poverty, although its impact may not be evenly distributed across all segments of society. These findings imply that poverty reduction policies cannot rely solely on increased spending or economic growth figures. Instead, greater emphasis is needed on the quality and effectiveness of public spending as well as the inclusivity of economic development. Local development strategies must be designed to better reflect the needs of the poor in order to achieve sustainable poverty alleviation.

Keywords: Poverty, Capital Expenditure, GRDP, Economic Growth

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural dan multidimensional di berbagai wilayah di Indonesia. *World Bank* mencatat bahwa pada tahun 2024 sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,9 juta orang masih tergolong miskin (Hananny & Priambodo, 2025), berdasarkan indikator standar kemiskinan global sebesar US\$6,85 per kapita per hari (*Purchasing Power Parity*). Isu kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan penghasilan, namun juga mencerminkan kondisi ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Dampak dari masalah kemiskinan dapat meluas pada peningkatan ketimpangan sosial, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan terhambatnya mobilitas ekonomi antargenerasi (World Bank, 2022). Melihat dampak kemiskinan tersebut, negara – negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membuat komitmen global sebagaimana tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang salah satu dari 17 tujuan utama SDGs menargetkan penghapusan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2030 (Bappenas, 2015). Seruan ini memperkuat urgensi bahwa pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin.

Kawasan Barlingmascakeb yang mencakup Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen walaupun memiliki kedekatan geografis namun memperlihatkan heterogenitas dalam struktur ekonomi, kapasitas fiskal, serta capaian pembangunan sosial (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, 2018). Menurut BPS (2024a), empat dari lima kabupaten di wilayah Barlingmascakeb, yakni Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas masuk dalam sepuluh besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus.

Melihat pada struktur APBD Provinsi tercatat bahwa unsur belanja modal Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dua provinsi tetangganya, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 2024, realisasi belanja modal Jawa Tengah mencapai Rp11.228,81 miliar, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur mencatatkan nilai yang lebih besar dimana masing – masing sebesar 15.871,90 miliar dan 1.6569,36 miliar. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup kompetitif, yaitu sebesar 4,5%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (4,3%) dan setara dengan Jawa Barat (4,5%). Dalam konteks kontribusi regional, Kabupaten Cilacap memainkan peran strategis sebagai salah satu motor penggerak ekonomi provinsi. Dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp104 triliun pada tahun 2024, Cilacap

menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Jawa Tengah setelah Kota Semarang, sekaligus mempertegas posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Tengah. Namun demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih berada pada angka 10,47%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Jawa Barat (7,46%). Kondisi ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, melalui alokasi belanja modal yang lebih efektif dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

Pemerintah memiliki peran untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai permasalahan lainnya di masyarakat melalui belanja dan transfer pemerintah (Leng et al., 2021). Salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan dan pengurangan kemiskinan adalah belanja modal, yaitu pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan aset tetap seperti infrastruktur, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2022). Belanja modal diyakini mampu menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian, khususnya dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses layanan publik. Teori Keynesian memberikan dasar teoritis terhadap peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Menurut Keynes, dalam kondisi ketidakseimbangan ekonomi, intervensi fiskal melalui pengeluaran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran, yang pada gilirannya dapat menekan angka kemiskinan (Mankiw, 2024). Pada teori *trickle-down effect*, Aghion dan Bolton (1997) pada penelitiannya menjelaskan bahwa ekonomi bisa stabil kalau modal terus tumbuh, dimana pada tahap awal pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa membuat ketimpangan (jurang antara kaya dan miskin) makin lebar. Walaupun demikian, seiring waktu jika ekonomi terus mengalami pertumbuhan, ketimpangan itu akan mulai mengecil seperti Kurva Kuznets. Sehingga dibutuhkan peran campur tangan pemerintah agar pemerataan dan efisiensi meningkat.

Sejumlah studi empiris mengonfirmasi pentingnya belanja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Chude et al. (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran publik untuk sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dahmardeh & Tabar (2013) pada penelitiannya menjelaskan dampak langsung dan tidak langsung dari Belanja Pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan. Mereka menjelaskan bahwa Investasi Pemerintah melalui program penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial, yang didanai oleh pendapatan umum secara langsung berdampak dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan investasi dalam infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan oleh pemerintah memiliki dampak tidak langsung seperti kesempatan kerja yang lebih besar dan lebih banyak makanan murah. Efektivitas pengeluaran publik bukan semata dari besarnya anggaran, tetapi sangat tergantung pada kapasitas institusi daerah dalam melakukan perencanaan, transparansi anggaran, dan pengendalian penyimpangan (Zouhar et al., 2021). Belanja modal yang alokasinya efektif dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu wilayah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan (Miar & Yunani, 2020). Hal serupa disampaikan Joy et al. (2021); Sasmal & Sasmal (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal memungkinkan perluasan akses publik terhadap infrastruktur dan layanan dasar, memperkuat produktivitas, memicu investasi swasta, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Runtunuwu et al. (2023) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, belanja modal tidak berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan karena penggunaannya yang tidak produktif, seperti untuk pembelian kendaraan dan peralatan, bukan pada infrastruktur publik yang berkelanjutan. Belanja modal justru dapat meningkatkan kemiskinan ketika dialokasikan pada proyek yang inefisien dan tidak tepat sasaran karena kelemahan institusional dan birokrasi sehingga melemahkan kesempatan ekonomi (Dimnwobi et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel kunci dalam penurunan kemiskinan setelah belanja modal. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan efek redistributif yang mampu mengangkat kelompok miskin (Mankiw, 2024). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur performa ekonomi suatu wilayah karena mampu memberikan gambaran kuantitatif tentang total nilai tambah pada suatu kawasan dan periode tertentu (BPS, 2024b). Beberapa studi menunjukkan bahwa PDRB

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Muryani & Larasati (2024) menemukan pengaruh negatif signifikan antara PDRB dan kemiskinan di wilayah NTT. Purba et al. (2023) juga menekankan bahwa peningkatan PDRB, bersama dengan akses listrik dan tingkat literasi, memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan adanya peningkatan output nasional dan produktivitas faktor produksi yang secara umum meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan (Sasmal & Sasmal, 2016). Pertumbuhan ekonomi akan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan tersebut bersifat inklusif sehingga manfaat ekonomi tersebar ke seluruh lapisan masyarakat (Seth & Alkire 2021; Sasmal & Sasmal, 2016; Kireyev, 2016).

Beberapa studi justru menunjukkan hasil yang kontradiktif, antara lain studi Pertiwi & Purnomo (2022) menyatakan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hanafi (2021) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi secara positif terhadap kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan distribusi pendapatan dan akses pelayanan publik yang padat manfaat. Dengan demikian, kebijakan seperti redistribusi fiskal, penguatan sektor informal, dan investasi sosial sangat diperlukan agar pertumbuhan dapat benar-benar memberi ruang bagi penurunan kemiskinan secara nyata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, seperti tata kelola pemerintahan, karakteristik wilayah, serta kualitas alokasi anggaran publik. Oleh karena itu, pendekatan analisis berbasis wilayah menjadi penting untuk menangkap dinamika lokal secara lebih akurat. Dalam kerangka tersebut, penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menjadi relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan serta memberikan rekomendasi yang berbasis data dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di tingkat daerah. Penelitian ini secara khusus menggunakan data panel kabupaten/kota di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) selama periode 2015–2024. Pemilihan tahun awal 2015 didasarkan pada dimulainya komitmen global melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs), di mana pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan utama, yakni Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan data panel kabupaten kota yang termasuk dalam Wilayah Barlingmascakeb periode 2015 – 2024. Data yang digunakan adalah variabel Belanja Modal dan PDRB (sebagai variabel bebas) dan variabel Kemiskinan (sebagai variabel terikat). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel kabupaten di Wilayah Barlingmascakeb. Metode penelitian dijelaskan secara rinci melalui uraian mengenai desain penelitian, karakteristik populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

1. *Research Design*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Jenis asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, serta bagaimana arah dan kekuatan hubungan tersebut. Penelitian ini bersifat eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antarvariabel yang diteliti berdasarkan teori dan hasil empiris sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berbentuk data panel, yaitu data *cross-section* (lima kabupaten) di wilayah Barlingmascakeb dengan *time-series* (tahun 2015–2024). Penggunaan data panel memberikan keuntungan dalam mengatasi bias karena heterogenitas individu (wilayah) dan memungkinkan deteksi dinamika antar waktu (Gujarati & Porter, 2013).

2. *Participants (Population and Sample)*

Penelitian difokuskan secara purposif pada kawasan Barlingmascakeb yang terdiri dari lima kabupaten: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Kawasan ini dipilih karena termasuk dalam wilayah strategis pengembangan wilayah selatan Jawa Tengah. Sampel penelitian terdiri dari data tahunan masing-masing kabupaten selama

sepuluh tahun (2015–2024), sehingga diperoleh sebanyak 50 unit observasi (5 kabupaten × 10 tahun). Pemilihan sampel bersifat sensus karena seluruh populasi dalam lingkup kawasan yang ditentukan digunakan sebagai unit analisis.

3. *Technique of Data Collection*

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap publikasi resmi dari instansi pemerintah. Sumber utama data meliputi:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data tingkat kemiskinan dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
- b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk data realisasi belanja modal daerah.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengakses dan mengunduh data dari situs resmi atau permintaan data tertulis apabila diperlukan. Validitas data dijamin melalui seleksi sumber yang kredibel dan perbandingan silang antar sumber.

4. *Instruments*

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga instrumen utama penelitian adalah format pengumpulan data dalam bentuk tabulasi panel yang disusun dalam lembar kerja digital. Setiap variabel didefinisikan dengan jelas:

- a. Kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin
- b. Belanja Modal berdasarkan realisasi anggaran belanja modal daerah (dalam rupiah)
- c. Produk Domestik Regional Bruto diwakili oleh PDRB atas dasar harga konstan

Untuk menguji pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel. Model ini dirancang untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen (belanja modal dan PDRB) dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antar wilayah dan antar waktu. Berikut adalah bentuk model empiris yang digunakan dalam penelitian:

$$K_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot BM_{it} + \beta_2 \cdot PDRB_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- a. K_{it} menyatakan tingkat kemiskinan (dalam persen) pada kabupaten i dan tahun t , sebagai variabel dependen.
- b. BM_{it} merupakan belanja modal daerah dalam satuan rupiah, yang mencerminkan investasi publik oleh pemerintah daerah.
- c. $PDRB_{it}$ menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku dalam satuan rupiah, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. α adalah konstanta model yang menunjukkan nilai kemiskinan saat belanja modal dan PDRB bernilai nol (secara teoritis).
- e. β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi yang mengukur arah dan besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap kemiskinan.
- f. ε_{it} adalah komponen error yang menangkap pengaruh variabel lain di luar model.

Model ini diharapkan mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah (dalam bentuk belanja modal) dan kondisi ekonomi daerah (melalui PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb. Hasil estimasi dari model ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, apakah intervensi fiskal melalui belanja modal cukup efektif dalam menurunkan kemiskinan, serta sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

5. *Technique of Data Analysis*

Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi data panel 5 kabupaten yang termasuk dalam Wilayah Barlingmascakep selama periode 2015-2024. Karena karakteristik data yang melibatkan lebih dari satu unit observasi (kabupaten) dalam rentang waktu tertentu. Langkah-langkah analisis data meliputi:

- a. Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum setiap variabel,
- b. Uji pemilihan model panel seperti *Chow Test* (untuk memilih antara *pooled* dan *fixed effect*), *Hausman Test* (untuk memilih antara *fixed* dan *random effect*), dan *Breusch-Pagan LM Test* (untuk *pooled vs random*),
- c. Uji asumsi klasik, meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas

- d. Uji signifikansi baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji F), serta melihat nilai koefisien determinasi (R^2).

Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik **Eviews** versi 13 yang mendukung analisis panel secara efisien dan akurat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penyajian hasil penelitian ini dimulai dengan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data melalui statistik deskriptif. Tabel 1 merangkum ringkasan statistik deskriptif untuk variabel dependen Kemiskinan (K) dan variabel independen Belanja Modal (BM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Jenis	Variabel		
	K	BM	PDRB
Mean	15.30	388,208,600,000	37,446,633,877,800
Median	15.38	367,920,000,000	20,034,061,025,000
Maximum	20.44	843,990,000,000	104,540,670,000,000
Minimum	10.68	97,880,000,000	12,266,046,350,000
Std. Dev.	2.62	156,078,971,024	31,031,459,922,037

Sumber: Output Eviews

Hasil uji statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai kondisi sosial, fiskal, dan ekonomi di wilayah Barlingmascakeb selama periode 2015–2024. Dari sisi sosial, variabel tingkat kemiskinan (K) menunjukkan rata-rata sebesar 15,30 persen, dengan nilai tertinggi mencapai 20,44 persen yang terjadi di Kabupaten Kebumen dan nilai terendah 10,68 persen di Kabupaten Cilacap. Nilai median sebesar 15,38 persen mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang tidak jauh dari nilai rata-rata tersebut. Namun demikian, simpangan baku sebesar 2,62 persen mengindikasikan adanya variasi yang cukup nyata antar wilayah dan waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb belum sepenuhnya merata dan sangat mungkin dipengaruhi oleh kebijakan lokal maupun kemampuan fiskal masing-masing kabupaten.

Dari sisi fiskal, variabel belanja modal (BM) yang diukur dalam satuan miliar rupiah memiliki rata-rata Rp388,21 miliar, dengan nilai tertinggi Rp843,99 miliar di Kabupaten Cilacap dan nilai terendah Rp97,88 miliar di Kabupaten Purbalingga. Meskipun nilai median sebesar Rp367,92 miliar menunjukkan distribusi yang cukup seimbang, simpangan baku yang tinggi sebesar Rp156,08 miliar menandakan terdapat disparitas signifikan dalam alokasi belanja pembangunan antar kabupaten. Variasi ini bisa mencerminkan perbedaan dalam kapasitas fiskal, prioritas pembangunan daerah, serta efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Belanja modal yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan apabila tidak diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan rata-rata sebesar Rp37,45 triliun, dengan nilai maksimum Rp104,54 triliun di Kabupaten Cilacap dan nilai minimum Rp12,27 triliun di Kabupaten Purbalingga. Median PDRB sebesar Rp20,03 triliun, yang jauh di bawah rata-rata, serta simpangan baku sebesar Rp31,03 triliun, menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan ekonomi yang sangat tajam di antara kabupaten-kabupaten di kawasan ini. Distribusi PDRB yang sangat timpang mengindikasikan bahwa beberapa daerah memiliki kekuatan ekonomi yang dominan, namun tidak serta-merta menjamin pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan ini juga dapat memperkuat asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu inklusif atau mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, terutama jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan dan akses terhadap hasil-hasilnya.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menegaskan adanya ketimpangan struktural di wilayah Barlingmascakeb, baik dalam aspek sosial (tingkat kemiskinan), fiskal (belanja modal), maupun ekonomi (PDRB). Fakta ini memberikan landasan penting bagi analisis

regresi pada tahap selanjutnya untuk menguji sejauh mana belanja modal dan pertumbuhan ekonomi (diwakili oleh PDRB) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, temuan ini juga menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih merata, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat agregatif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2. Hasil Empiris Utama

	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
BM	0.0050* (2.948)	0.0439** (2.076)	0.0001* (4.467)
PDRB	0.0001** (-8.464)	0.0001* (-6.926)	0.0001** (-6.515)
Cons	0.0001* (25.712)	0.0001* (12.678)	0.0001** (16.743)
F	0.0001* (40.719)	0.0001* (40.232)	0.0001* (19.854)
Chow		0.0001	
Hausman			0.0001
N	50	50	50
Adjusted R ²	0.618	0.828	0.435

Sumber: Output Eviews. **, *, menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat 5% dan 10%, masing-masing (** p < 0,05, * p < 0,01)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) selama periode 2015–2024 menggunakan data panel. Dalam pengolahan data, dilakukan beberapa tahap pengujian, dimulai dari pemilihan model regresi panel terbaik hingga pengujian kelayakan model.

Pemilihan model dilakukan dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai dibandingkan dengan *Pooled Least Squares* (PLS), karena mampu menangkap perbedaan karakteristik antar wilayah secara individual. Selanjutnya, uji Hausman menunjukkan bahwa FEM juga lebih tepat dibandingkan *Random Effect Model* (REM), sehingga model FEM dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

Sebelum model diinterpretasikan, dilakukan pula uji asumsi klasik untuk memastikan validitas hasil estimasi. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear berlebihan antar variabel independen, sedangkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian residual model bersifat konstan. Hal ini menandakan bahwa model telah memenuhi asumsi dasar regresi linear klasik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model FEM, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$K = 26,090234 + 0,003338 \cdot BM - 0,000323 \cdot PDRB \quad (2)$$

Dalam persamaan ini, K menyatakan tingkat kemiskinan dalam persen, BM adalah belanja modal dalam satuan miliar rupiah, dan PDRB juga dalam miliar rupiah. Koefisien belanja modal sebesar 0,003338 menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar Rp1 miliar justru diikuti oleh peningkatan kemiskinan sebesar 0,0033 poin persentase, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini mengindikasikan bahwa belanja modal di wilayah tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan kemiskinan.

Sebaliknya, koefisien PDRB sebesar -0,000323 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1 miliar berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000323 poin persentase. Artinya, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, meskipun pengaruhnya relatif kecil secara numerik.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ($p = 0,0439$), sedangkan PDRB berpengaruh negatif signifikan ($p = 0,0001$). Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama – sama berpengaruh

signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai F-hitung sebesar 40,232 dan nilai signifikansi 0,0001. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,8277, yang berarti 82,77% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh belanja modal dan PDRB, sedangkan sisanya 17,23% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Temuan ini memperkuat bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb dan layak menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan PDRB secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb pada periode 2015–2024, namun arah pengaruh kedua variabel tersebut berbeda. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB memiliki pengaruh negatif.

Temuan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal justru diikuti oleh kenaikan angka kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan belanja modal, baik karena tidak tepat sasaran, kurang inklusif, maupun didominasi oleh proyek-proyek yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur publik yang tidak berpihak pada prinsip inklusivitas bahkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti relokasi paksa, gangguan terhadap ekonomi lokal, serta ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi kemiskinan. Contohnya terlihat di Kabupaten Banyumas, di mana belanja modal meningkat dari Rp363 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp432 miliar pada tahun 2021, namun angka kemiskinan juga naik dari 13,26% menjadi 13,66%. Hal serupa terjadi di Kabupaten Purbalingga, dengan peningkatan belanja modal dari Rp130 miliar menjadi Rp196 miliar, yang justru diikuti oleh kenaikan angka kemiskinan dari 15,9% menjadi 16,24%. Kondisi ini terjadi dalam konteks pandemi Covid-19 yang menimbulkan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, sehingga efektivitas alokasi belanja, khususnya belanja modal, menjadi faktor yang sangat krusial. Dengan demikian, peningkatan belanja modal tidak dapat dianggap sebagai solusi otomatis dalam pengentasan kemiskinan, melainkan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, tata kelola anggaran, serta kapasitas institusi daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat miskin. (Zouhar et al., 2021; Miar & Yunani, 2020). Dengan demikian, kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat menyebabkan belanja modal yang besar tetapi dengan hasil yang minim terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini secara teoritis bertentangan dengan pandangan Keynesian, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah termasuk belanja modal dapat meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Dalam konteks Keynesian, intervensi fiskal berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus alat untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Hasil empiris ini juga dapat dijelaskan melalui konteks implementasi belanja modal di daerah. Seperti dijelaskan oleh Runtunuwu et al., (2023) belanja modal tidak akan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan apabila alokasinya tidak produktif, misalnya digunakan untuk pembelian kendaraan atau aset yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Belanja modal di wilayah Barlingmascakeb terindikasi belum diarahkan secara strategis untuk menysasar sektor – sektor yang *pro-poor*. Belanja modal yang tidak menysasar kelompok miskin dapat memperparah kerentanan mereka karena membatasi akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar seperti listrik, air bersih, transportasi, dan fasilitas publik lainnya. Keterbatasan akses ini berdampak langsung pada berkurangnya kesempatan ekonomi, kehilangan pendapatan, dan pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan struktural (Dimnwobi et al., 2023).

Proyek – proyek pembangunan fisik yang besar, seperti jalan atau bangunan publik, belum tentu menyerap tenaga kerja lokal atau meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dalam jangka pendek. Tenaga kerja lokal yang tidak terserap dan rendahnya produktivitas masyarakat miskin menyebabkan mereka tidak memperoleh pendapatan yang cukup, sehingga tingkat kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat. Proyek belanja modal kerap kali membutuhkan waktu implementasi yang panjang dan belum tentu langsung berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin sehingga dalam jangka pendek belanja modal seringkali belum mampu mengentaskan kemiskinan (Ibanez & Agosto, 2022).

Sebaliknya, temuan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Wilayah

Barlingmascakeb. Hal ini konsisten dengan teori pertumbuhan klasik dan pendekatan *trickle-down effect*, yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi akan menciptakan aktivitas ekonomi tambahan, memperluas kesempatan kerja, dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Hasil ini sejalan dengan studi Muryani dan Larasati (2024) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara PDRB dan kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Peningkatan output ekonomi daerah secara langsung berkorelasi dengan perbaikan taraf hidup masyarakat, terutama melalui sektor – sektor produktif yang menyerap tenaga kerja miskin. Purba et al. (2023) juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang dapat menurunkan kemiskinan, terutama bila diiringi dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti listrik dan pendidikan. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan memicu peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mampu memperbaiki status ekonomi masyarakat dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan (Sasmal & Sasmal, 2016).

PDRB menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan, tetapi nilai koefisien yang relatif kecil dalam model menunjukkan bahwa dampaknya belum optimal atau belum inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan Hanafi (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok atas atau terkonsentrasi di sektor tertentu (misalnya industri besar atau jasa formal), akibatnya kelompok miskin tetap tertinggal meski angka PDRB meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. PDRB yang tumbuh namun hanya terkonsentrasi pada sektor atau kelompok tertentu berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan mempertahankan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mampu membuka akses terhadap lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat bawah, dan memperkuat jaring pengaman sosial akan berkontribusi efektif dalam mengurangi kemiskinan (Seth & Alkire 2021; Sasmal & Sasmal, 2016; Kireyev, 2016).

Dengan mempertimbangkan kedua variabel ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan arah kebijakan pembangunan sangat menentukan efektivitas pengentasan kemiskinan. Besarnya belanja modal belum menjamin keberhasilan jika tidak diikuti dengan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan perencanaan berbasis kebutuhan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan jika tidak disertai kebijakan distribusi dan perlindungan sosial yang kuat.

Temuan ini menguatkan pendapat Kemisola et al. (2014) yang menyatakan bahwa belanja konstruksi baru akan berdampak pada pengurangan kemiskinan jika difokuskan pada pembangunan infrastruktur publik yang inklusif. Di sisi lain, tidak semua wilayah merasakan efek yang sama dari pertumbuhan ekonomi, sehingga pendekatan berbasis daerah menjadi penting untuk menangkap dinamika lokal secara lebih akurat.

Konteks Barlingmascakeb menjadi relevan karena wilayah ini mewakili kompleksitas pembangunan daerah dimana terdapat kesenjangan antar kabupaten, perbedaan struktur ekonomi, dan variasi dalam kapasitas fiskal. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan di kawasan ini harus mempertimbangkan disparitas antarwilayah, ketepatan belanja, dan peran sektor lokal. Diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan pertumbuhan atau belanja, tetapi juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program yang bersifat langsung, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar angka anggaran atau pertumbuhan ekonomi. Ia membutuhkan perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan, dengan menempatkan kelompok miskin sebagai pusat kebijakan. Dalam konteks SDGs, hal ini juga sejalan dengan prinsip *no one left behind*, yaitu memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang paling tertinggal.

D. Kesimpulan

Temuan penelitian secara empiris, menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan belanja modal justru diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal

belum efektif menyukseskan kebutuhan masyarakat miskin. Kemungkinan penyebabnya antara lain adalah penggunaan belanja yang kurang produktif, tidak diarahkan pada sektor padat karya, atau tidak menyentuh wilayah dan kelompok rentan yang paling membutuhkan. Belanja publik yang tinggi belum menjamin keberhasilan pengentasan kemiskinan jika tidak dibarengi dengan arah dan strategi pelaksanaan yang tepat.

Temuan lain dari penelitian ini adalah PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb. Hasil ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi dan model *trickle-down*, namun perlu dicatat bahwa pengaruhnya relatif kecil. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum bersifat inklusif, atau belum sepenuhnya menyentuh kelompok miskin, terutama di sektor informal dan wilayah perdesaan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bertumpu pada besaran anggaran atau angka pertumbuhan ekonomi. Kualitas belanja publik, arah kebijakan yang berpihak, serta strategi pertumbuhan yang inklusif menjadi kunci penting. Untuk itu, disampaikan beberapa saran kebijakan sebagai berikut:

1. Memrioritaskan pemanfaatan belanja modal pada sektor yang *pro-poor*, seperti pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa, akses pendidikan dan kesehatan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi sumber daya lokal yang berberbasis padat karya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan di wilayah tertinggal.
3. Meningkatkan peran sektor ekonomi dengan meningkatkan alokasi bantuan untuk memperkuat sektor UMKM dan sektor.
4. Memperkuat tata kelola keuangan daerah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Penguatan sistem perencanaan dan pengawasan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa alokasi anggaran belanja publik berorientasi pada program pengentasan kemiskinan.
5. Melakukan analisis faktor penyebab kemiskinan yang berbasis wilayah. Mempertimbangkan perbedaan karakteristik kondisi sosial ekonomi antar kabupaten di kawasan Barlingmascakeb menjadi penting dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
6. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dengan pendekatan pentahelix untuk menyusun program kebijakan yang saling terkait dan menguntungkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika kebijakan daerah secara konsisten berpihak pada masyarakat miskin, inklusif, dan berbasis bukti.

E. Referensi

- Achmad, K. M., & Sri, R. I. (2023). *The Effect of Local Origin Income, General Allocation of Funds, and Capital Expenditure on Poverty in Ngawi District*. World Journal of Business, Project and Digital Management, 1. <http://world.journal.or.id/index.php/bpdm>
- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. *The Review of Economic Studies*, 64(2), 151–172. <https://doi.org/10.2307/2971707>
- Bappenas. (2015). *SDGs Knowledge Hub*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- BPS. (2024a). *Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota 2024*. BPS. https://demakkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU0IzE%3D/kemiskinan-di-provinsi-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-2024.html?utm_source=chatgpt.com
- BPS. (2024b). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA* (Vol. 15). Badan Pusat Statistik.
- Chude, N. P., Chude, D. I., Anah, S. A., & Chukwunulu, J. I. (2019). *The Relationship between Government Expenditure, Economic Growth and Poverty Reduction in Nigeria*. IOSR Journal of Economics and Finance, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.9790/5933-1002020108>

- Dahmardeh, N., & Tabar, M. H. (2013). *Government Expenditures and Its Impact on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Sistan and Baluchestan Province of Iran*. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 2(1), 251–260.
- Dimnwobi, S. K., Onuoha, F. C., Uzoehina, B. I., Ekesiobi, C. S., & Nwokoye, E. S. (2023). Does public capital expenditure reduce energy poverty? Evidence from Nigeria. *International Journal of Energy Sector Management*, 17(4), 717–738. <https://doi.org/10.1108/IJESM-03-2022-0008>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. (2018). *Profil Pengembangan Dan Penyiapan Kewilayahan Investasi Di Wilayah Barlingmascakeb*.
- Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327>
- Gujarati, & Porter. (2013). *Dasar Dasar Ekonometrika* (R. C. Mangungsong (ed.); 5 ed.). Salemba Empat.
- Hanafi, I. (2021). Influence of Municipality Minimum Wage, GDRP and Balanced Funds To Poverty. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(2), 799-810. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i2.41497>
- Hananny, Z., & Priambodo, D. (2025). *World Bank: Last year 60.3% of Indonesians classified as poor*. IDNFinancials. <https://www.idnfinancials.com/news/54230/world-bank-last-year-60-3-of-indonesians-classified-as-poor>
- Ibanez, J. G., & Agosto, Z. liu. (2022). *The Role of Infrastructure in Economic Growth, Poverty Reduction, and Regional Integration*. Lincoln Institute of Land Policy. <https://www.lincolninst.edu/pt-br/publications/articles/2022-08-role-infrastructure-economic-growth-poverty-reduction-regional-integration?>
- Joshua, A. S. (2024). *Impact of Government Expenditure on Poverty and Inequality in Nigeria: A Disaggregated Approach*. *International Review of Business and Applied Sciences*, 5(1). <https://www.researchgate.net/publication/382975991>
- Kireyev, P. A. (2016). Growth Inclusiveness and Equality. *International Monetary Fund*, 81–100.
- Joy, J. N., Okafor, M. C., & Ohiorenuan, I. H. (2021). Impact of Public Capital Expenditure on Poverty Rate in Nigeria. *International Journal Papier Public Review*, 2(4), 46–55. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i4.115>
- Leng, G. X., Feng, X. L., & Qiu, H. G. (2021). *Income Effects of Poverty Alleviation Relocation Program on Rural Farmers in China*. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 891–904. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63583-3](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63583-3)
- Mankiw, N. G. (2024). *MACROECONOMICS* (9th ed.). Worth Publisher.
- Miar, & Yunani, A. (2020). *The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(01), 91–102.
- Muryani, & Larasati A. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Education Health, and Unemployment on The Poverty Rate in Regencies/Cities of East Nusa Tenggara Province. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)* ISSN:2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS, 5(6), 43–56. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.4>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Belanja Modal Tahun 2018-2022*. Dataset - Portal Data Jawa Tengah. <https://data.jatengprov.go.id/ne/dataset/belanja-modal-tahun-2018-2022>
- Pertiwi, E., & Purnomo, D. (2022, July). Analysis of the effect of gross regional domestic product (GRDP), human development index (IPM), and open unemployment rate (TPT) on poverty rate in lampung province. In *Proceedings Book The International Conference On Islamic Economics, Islamic Finance, & Islamic Law (ICIEIFIL)* (pp. 47-61).
- Purba, J. T., Budiono, S., Hariandja, E. S., & Pramono, R. (2023). Sustainability strategy to alleviate poverty through education, energy, GRDP, and special funds: evidence from Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(5), 1397-1406.
- Runtuuwu, P. C. H., Husen, A., & Rajasekera, J. (2023). Capital Expenditure, Social Expenditure and Economic Growth Versus Poverty Level: A Study in North Maluku, Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(9), e0962. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.962>
- Sasmal, R., & Sasmal, J. (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation.

International Journal of Social Economics, 43(6), 604–618.

- Seth, S., & Alkire, S. (2021). Multidimensional poverty and inclusive growth in india: An analysis using growth elasticities and semi-elasticities. In *Research on Economic Inequality* (Vol. 29). <https://doi.org/10.1108/S1049-258520210000029007>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Nomor 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- World Bank. (2022, Desember 5). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. World Bank Group; World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>
- Zouhar, Y., Jellema, J., Lustig, N., & Trabelsi, Nora. (2021). Public Expenditure and Inclusive Growth - A Survey. *IMF Working Paper*, November, 4–29.